

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Desa dituntut mandiri dalam menggerakkan urusan pemerintahan terutama dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Salah satunya sumber pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa atau ADD yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa secara penuh oleh pemerintah pusat, hal ini dimaksudkan supaya desa dapat mandiri dalam mengelola keuangan dan desa dapat mengalokasikan dana desa dengan maksimal sesuai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Sehingga diharapkan kedepannya desa tidak bergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Desa juga memainkan peran yang strategis dalam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini dikarenakan desa dapat membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya<sup>2</sup>. Akan tetapi menurut data dari kementerian desa, di Indonesia masih terdapat 9.854 Desa tertinggal pada tahun 2022<sup>3</sup>, hal ini menjadi bukti bahwa belum

---

<sup>2</sup> Atmadja, A.T. and K.A.K Saputra. 2018. Determinant Factors Influencing The Accountability Of Village Financial Management. *Academy Of Strategic Management Journal*. Volume 17, Issue 1

<sup>3</sup> [www.kemeneDesa.co.id](http://www.kemeneDesa.co.id), jumlah Desa tertinggal tahun 2022, diakses pada 20 Januari 2023

sempurnanya peran pemerintah khususnya pemerintah desa dalam memberdayakan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Sujarweni (2015) dalam membangun dan mengembangkan desa, pemerintah desa khususnya kepala desa harus mengetahui cara mengelola serta menjalankan pemerintahan dengan baik terutama di dalam hal pengelolaan pendapatan<sup>4</sup>. Tata kelola pemerintahan desa berpengaruh pada baik tidaknya suatu pengelolaan sehingga hal ini penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui serta mengerti cara mengelola desa dengan baik suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru perlu diperlukan mengingat dan menyadari akan adanya hambatan dalam pembangunan suatu daerah.

Dalam pengembangan sebuah desa tentunya pengalokasian dana desa merupakan suatu langkah yang sangat penting. Pemerintah desa yang telah diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab tentunya harus patuh dalam menjalankan tugasnya, serta memiliki rasa tanggung jawab dan amanah seperti yang dikatakan pada teori kepatuhan atau *Compliance Theori* yang dicetuskan oleh Stanley Migram pada tahun 1963, menjelaskan tentang pengaruh kepatuhan dalam proses sosialisasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa individu cenderung mematuhi hukum yang sesuai dengan norma-norma internal mereka ditambah dengan ambisi yang kuat terhadap nilai atau sasaran yang ingin dicapai. Sehingga dengan konsep tersebut

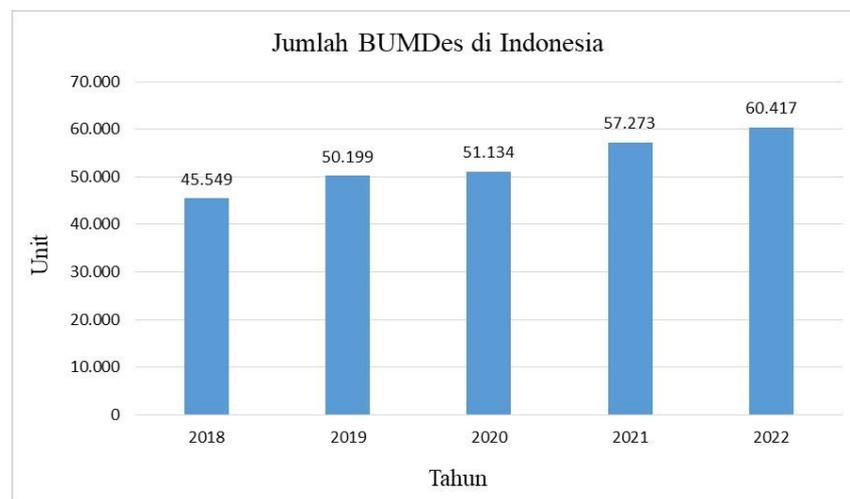
---

<sup>4</sup> Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

pemerintah desa harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah pusat salah satunya pengalokasian dana desa.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa menggunakan dana desa adalah dengan mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 1.022 BUMDes yang telah didaftarkan, lalu angka tersebut melonjak drastis pada tahun 2019 dengan angka mencapai 50.199 unit BUMDes yang telah didaftarkan<sup>5</sup>, berikut data perkembangan BUMDes dari tahun 2015 hingga 2019.

**Grafik 1.1**



Sumber : KemenDesa.go.id

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Sulaeman, et.all., BUMDes menuju optimalisasi ekonomi Desa.(Medan: yayasan kita menulis,2020) hal.3

Hingga tahun 2022 diperkirakan jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 60.417 unit BUMDes yang telah tumbuh<sup>6</sup>. Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 tercatat memiliki 6.118 unit BUMDes yang aktif, akan tetapi hanya 537 BUMDes yang berstatus maju<sup>7</sup>. Hal ini dikarenakan banyaknya BUMDes yang didirikan hanya sebatas untuk formalitas desa saja. Sedangkan di Kabupaten Tulungagung sendiri terdapat 170 unit BUMDes.

BUMDes di Kabupaten Tulungagung ini memiliki peran untuk mengelola kekayaan dan potensi dari masing-masing desa. Dengan optimalnya potensi dan kekayaan desa diharapkan desa dapat menjadi Desa yang mandiri sehingga dapat memiliki penghasilan asli desa, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga, dan tentu saja dapat mengurangi angka kemiskinan pada desa sehingga dapat menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan warganya. Di Kabupaten Tulungagung angka kemiskinan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 72.520 jiwa, jumlah ini lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya yang dapat mencapai 78.000 hingga lebih dari 80.000 jiwa<sup>8</sup> angka kemiskinan ini juga bisa menjadi salah satu tolak ukur atau indikator kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>6</sup> Bumdes.KemenDesa.go.id, “Perkembangan BUMDes tahun 2022” diakses pada tanggal 3 Juni 2023

<sup>7</sup> Jatim.bps.co.id, “Jumlah BUMDes maju di Provinsi Jawa Timur tahun 2022” diakses pada tanggal 3 Juni 2023

<sup>8</sup> Tulungagungkab.bps.go.id “angka kemiskinan kabupaten tulungagung tahun 2022” diakses pada tanggal 3 Juni 2023

Dalam hal ini peran BUMDes dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan angka kesejahteraan juga sangat berpengaruh, mengingat BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang sangat dekat dan tidak asing lagi dikalangan masyarakat. BUMDes dapat mengambil langkah untuk mengelola potensi dan kekayaan Desa dianggap penting sebagai upaya menekan jumlah kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan data kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menurut survey Badan Pusat Statistik.

**Grafik 1.2**



Sumber : [tulungagungkab.bps.go.id](http://tulungagungkab.bps.go.id)

Salah satu Desa di Kabupaten Tulungagung yang telah mengelola dana desa melalui BUMDes dengan sangat baik adalah Desa Kendalbulur yang terletak di Kecamatan Boyolangu, desa ini sudah mandiri dan mampu mengelola dana Desa, serta mengoptimalkan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki

Desa Kendalbulur bernama BUMDes Larasati yang didirikan pada tahun 2016.

Dengan optimalnya Alokasi Dana Desa dan potensi desa yang dimiliki tentu saja desa ini memiliki Pendapatan Asli Desa atau PADes yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur. Di mana pengelolaannya akan dilakukan oleh BUMDes Larasati yang akan disalurkan kepada warga masyarakat Desa Kendalbulur melalui program-program yang telah dibuat untuk mensejahterakan warga. Menurut data dari arsip Desa Kendalbulur tingkat kemiskinan dilihat dari data penduduk yang menerima bantuan BPNT dan PKH dibawah ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sehingga ada indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur meningkat.

**Grafik 1.3**



Sumber : Arsip Desa Kendalbulur

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik**

## **Desa (BUMDes) “LARASATI” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kendalbulur”.**

### **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Terdapat identifikasi serta batasan masalah dalam penelitian ini, dengan kesimpulan bahwa :

1. Peneliti mengidentifikasi program BUMDes Larasati dalam penerapan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur.
2. Peneliti mengidentifikasi kendala yang terjadi saat menerapkan program yang dilakukan oleh BUMDes Larasati terhadap masyarakat Desa Kendalbulur, serta mengidentifikasi solusi dari kendala yang terjadi.
3. Peneliti mengidentifikasi kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur pasca penerapan program yang dilakukan oleh BUMDes Larasati.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran BUMDes Larasati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa kendalbulur melalui program pelatihan keterampilan, program bantuan permodalan, dan program subsidi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BUMDes saat menerapkan program tersebut?

3. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat Desa kendalbulur pasca penerapan program tersebut?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program BUMDes Larasati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program-program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur.
3. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur pasca pelaksanaan program dari BUMDes Larasati.

**E. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengaruh kepada ilmu ekonomi mikro khususnya tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BUMDes Larasati

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan BUMDes Larasati untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Desa kendalbulur.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi di dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan terhadap pengembangan penelitian selanjutnya yang mengangkat tema yang sama dengan variabel yang berbeda.

## **F. Penegasan Istilah**

Dalam upaya memudahkan pembaca memahami judul tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “LARASATI” Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kendalbulur”, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Peran BUMDes

Bumdes, yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga atau asosiasi yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu. Badan usaha mencakup berbagai jenis lembaga, baik yang berorientasi pada keuntungan maupun yang non-profit. Sifat dari badan usaha dapat bervariasi berdasarkan pendirinya, tujuan, misi, dan motivasinya. Istilah "badan usaha" bersifat umum dan mencakup makna yang lebih luas daripada

perusahaan.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa, Bumdes adalah badan usaha di mana Desa memiliki seluruh atau sebagian besar modal melalui partisipasi langsung dari kekayaan Desa atau Dana Alokasi Desa (ADD), yang dipisahkan untuk mengelola aset, pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan maksimal masyarakat Desa<sup>10</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status), di mana individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, sehingga menjalankan suatu peran tertentu<sup>11</sup>. Oleh karena itu, peran Bumdes dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban badan usaha milik desa untuk mencapai visi dan misinya demi kepentingan masyarakat desa.

#### b. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kesejahteraan" berasal dari kata "sejahtera", yang berarti aman, damai, makmur, dan terjamin. Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu-individu yang terlibat berada dalam kondisi sehat, damai, dan makmur<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhdie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (Mataram : PT. Gelora Aksa Pratama,2012)., Hlm 11

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 243

<sup>12</sup> Amirus Sodik, Kesejahteraan Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, judul operasional "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "LARASATI" Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kendalbulur" diperoleh untuk mengetahui bagaimana peran yang diambil oleh BUMDes dalam memfasilitasi masyarakat Desa Kendalbulur untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian memuat tentang keseluruhan pembahasan penelitian berupa bagian pertama, bagian kedua, dan bagian terakhir. Berikut Penyusunan yang akan dilakukan :

### 1. Bagian Pertama

Bagian pertama terdiri dari halaman sampul depan, sampul dalam, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran-lampiran, dan halaman abstrak.

### 2. Bagian Kedua

Bagian kedua merupakan pokok atau isi dari penelitian yang terbagi ke dalam beberapa bagian seperti berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat konteks penelitian guna memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang diteliti, identifikasi dan batasan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah yang

memuat beberapa penjelasan dari masalah yang akan dibahas dan mengetahui arah penelitian, dan yang terakhir merupakan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori memuat tentang tinjauan pustaka atau buku yang berisi teori besar dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini teori yang didapatkan dari buku ataupun rujukan akan dijadikan bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti dan data sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap tahap penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang diperoleh dari topik sesuai dalam pertanyaan dalam rumusan masalah melalui pengamatan maupun hasil wawancara dilapangan.

## BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisikan jawaban dari masalah penelitian dengan cara menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan implementasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap di lapangan.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari, kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat diketahui pokok dari penelitian yang telah dilakukan. selain itu bab ini juga berisikan saran atau rekomendasi.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi keterangan penunjang seperti daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.